



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSTIANUS
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 111625

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **616.450.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/45 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 9.100.000
3. Tanah Seluas 60.000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 52.600.000
4. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 9.900.000
5. Tanah Seluas 40.000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 26.400.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 11.220 m2/120 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 182.500.000
7. Tanah Seluas 551 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 78.300.000
8. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
9. Tanah Seluas 15.200 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 6.750.000
10. Tanah Seluas 551 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
11. Tanah Seluas 40.000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL



SENDIRI Rp. 36.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

4.500.000

1. MOTOR, KAWASAKI KAZE R SEPEDA MOTOR Tahun 2000,
HASIL SENDIRI Rp. 1.500.0002. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp.

46.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

28.921.230

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

695.871.230

III. HUTANG

Rp.

128.914.367

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

566.956.863

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.